

**Rp1.638,7 triliun atau 57,2%
dari target Rp1.865,5 triliun,
terdiri dari :**

**Penerimaan perpajakan:
Rp 1.330,4 triliun**

**Pajak
Rp 1.135,4 triliun**

**Bea Cukai
Rp 194,9 triliun**

**PNBP
Rp 306,8 triliun**

DETAIL PAJAK

- **Pph Badan:**
bruto naik 7,5% (Rp280,08 T),
tapi neto turun 8,7% (Rp194,2 T)
- **Pph Orang Pribadi:**
bruto naik 38,8% (Rp15,98 T),
neto naik 39,1% (Rp15,91 T)
- **PPN & PPNBM**
bruto turun 0,7% (Rp631,8 T),
neto turun 11,5% (Rp416,49 T)

Inspirasi Perubahan

02 GOVERNMENTTODAY
Mentan Minta Maaf Soal
Beras Oplosan

05 NUSANTARA
Resmi! Kemnaker Larang Syarat
'Good Looking' di Lowongan Kerja

10 LISTSTYLE
Trik Feather Stroke
untuk Alis Natural On Point

**MENKEU KEJAR RATUSAN
PENUNGGAK PAJAK JUMBO**

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (22/9/2025) mengungkapkan telah mengantongi data 200 penunggak pajak dalam jumlah besar. Purbaya mengatakan tidak akan memberi ampun dan akan mengejar para penunggak pajak yang masih bebas berkeliaran itu. Terlebih lagi, potensi pendapatan dari 200 penunggak pajak itu mencapai Rp 50 triliun. Purbaya optimistis dalam waktu dekat ini akan mampu mengejar dan menagih mereka. Bahkan, ada indikasi bahwa penunggak pajak ini lebih dari 200 wajib pajak, bahkan mencapai 300 pengusaha. Nilai total dari tunggakan pajak itu juga cukup fantastis, mencapai Rp 300 triliun. Namun, sampai saat ini masih belum menuntaskan atau belum membayar pajak tersebut. Ada indikasi kuat bahwa tunggakan yang sebagian dari pengusaha kelapa sawit ini sudah berlangsung lama, sebab infomasi tersebut sudah terendus sejak era Presiden Joko Widodo. Di satu sisi, banyaknya tunggakan pajak tersebut juga berdampak pada pendapatan negara. Pasalnya, penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Bahkan, per Agustus 2025 ini penerimaan pajak masih kontraksi 5,1%, kemudian pendapatan negara secara keseluruhan juga masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk meningkatkan pendapatan negara yang beberapa bulan belakangan masih terkontraksi, Menkeu Purbaya menyiapkan enam program quick win.

BACA HAL 11...



MENTAN MINTA MAAF SOAL BERAS OPLOSAN

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, tiba-tiba meminta maaf atas istilah beras oplosan yang pernah diucapkan ramai beberapa bulan lalu. Dia menjelaskan bahwa yang benar bukan beras oplosan namun pelanggaran mutu pada beras.



“Yang oplos kemarin minta maaf agak gaduh dikit. Itu bukan oplos, tetapi pelanggaran,” kata Amran dalam rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di kantornya, Senin (22/9/2025).

Lebih lanjut Amran menyebut bahwa ada 10 merek telah menjual beras di bawah ketentuan yang diatur pemerintah dengan tingkat patahan (broken rice) di atas 40%–50%. Di mana beras premium yang dijual sejumlah produsen telah melebihi standar kelas untuk kerusakan beras. Kondisi ini menyebabkan harga jual

beras melonjak jauh di atas harga wajar.

“Ini yang ditangkap, standarnya adalah 14%, tapi yang dijual adalah 50%, 40%,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan jumlah beras patah yang mencapai 40-50% itu seharusnya dijual; dengan harga Rp8.000/kg, maksimal Rp12.000/kg. Namun, yang terjadi di lapangan harga jualnya mencapai Rp 17.000/kg. “Artinya Rp 5.000/kg tidak halal,” tambah Amran.

Amran menuturkan, 10 merek yang telah melanggar mutu dan kualitas beras premium yakni WS, LS, SM, JN, NU, RU, MD, PR, BS dan SR. Namun, Amran tidak menyebutkan lebih terperinci merek yang dipaparkan tersebut.

“Ini saya tunjukkan sedikit kepada bupati, supaya kalau ada bertanya di daerah. Ini yang ditangkap,” terangnya dilansir bloomberg.

Menurutnya, pelaku usaha komoditas tersebut tidak bisa serta merta mempermainkan penjualan beras. Hal itu karena terdapat subsidi pemerintah dalam proses produksi beras.

“Jadi harga sudah naik, dan ini seluruh komoditas tidak boleh dipermainkan. Ini yang harus intervensi pemerintahan. Kenapa? Rp150 triliun APBN disitu subsidi. Jadi tidak boleh dipermainkan,”

Seperti yang telah diketahui, pada Agustus lalu Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi mutu beras premium. Ketiga tersangka berasal dari PT Padi Indonesia Maju (PT PIM), yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group.

Dirtipideksus Bareskrim, Brigjen Helfi Asegaf mengungkapkan mereka menjadi tersangka adalah Presiden Direktur (Presdir) PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI dan juga Kepala Kontrol Kualitas di perusahaan yang sama dengan inisial DO.

“Menetapkan tersangka dalam produksi beras premium tidak sesuai standar mutu dalam kemasan,” kata Helfi dalam konferensi pers, Selasa

(5/8/2025).

Helfi menegaskan penetapan tersangka dilakukan usai pemeriksaan terhadap 24 saksi hingga ahli. Helfi juga menjelaskan, PT Padi Indonesia Maju dalam kasus ini merupakan produsen beras premium untuk merek Fortune, Sania, Siip, dan Sovia.

Penetapan tersangka dari PT PIM melengkapi tersangka lainnya yang sudah ditetapkan yakni sejumlah pegawai di PT Food Station (FS): KG selaku Direktur Utama PT FS, RL selaku Direktur Operasional PT F dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

Sementara, untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global, Mentan Amran mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai Rp371,6 triliun.

Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta. “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” kata Mentan.

Adapun rincian investasi Rp371,6 triliun itu terdiri atas dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta Rp92,966 triliun atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi Rp89,172 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai Rp371,6 triliun mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai Rp9.684,96 triliun, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai

sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan industrialisasi pertanian menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bukan hanya melalui industri manufaktur, tetapi juga industrialisasi pertanian dan perkebunan dengan menambah nilai tambah produk pangan, katanya, menegaskan.

“Tapi, melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan dan turunannya itu juga merupakan industri untuk keluar dari middle income trap,” kata Mendagri dilansir antara.

Tito menekankan industrialisasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa melalui ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan petani.

Ia mengatakan strategi hilirisasi pertanian sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan dengan dukungan anggaran besar mencapai Rp371 triliun.

Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada produksi mentah, melainkan ikut mendorong lahirnya industri pengolahan pangan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global. (ant,ist/lut)



Yang oplos kemarin minta maaf agak gaduh dikit. Itu bukan oplos, tetapi pelanggaran. Ini yang ditangkap, standarnya adalah 14%, tapi yang dijual adalah 50%, 40%. Jadi harga sudah naik, dan ini seluruh komoditas tidak boleh dipermainkan. Ini yang harus intervensi pemerintahan. Kenapa? Rp150 triliun APBN disitu subsidi. Jadi tidak boleh dipermainkan,”

Andi Amran Sulaiman

Menteri Pertanian

DPR DUGA ADA JUAL-BELI JAM PENERBANGAN

Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan alasan maskapai Garuda Indonesia dan Citilink tidak ada di jadwal jam favorit penerbangan. Atas dasar temuan tersebut, Mufti menduga terdapat mafia yang melakukan jual beli jam penerbangan di industri maskapai Indonesia, terutama PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA).

Tak tanggung-tanggung, dugaannya nilai jual-beli jam penerbangan itu mencapai miliaran rupiah. Dugaan itu dilontarkan dalam rapat dengar pendapat bersama Garuda Indonesia, di Senayan, Senin (22/9/2025).

"Saya sedikit ada curiga begini, ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, jam-jam favorit, kenapa ya kok Garuda nggak ada? Kenapa Citilink nggak ada? Kenapa maskapai swasta? Lalu saya cepat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Komisi V, katanya jam-jam penerbangan itu diperjual-belikan. Betul tidak?" katanya dalam forum tersebut.

Atas hal itu, Mufti meminta agar direksi Garuda Indonesia terbuka dan menjelaskan alasan tersebut ke publik. "Jangan takut-takut. Kita akan bantu bagaimana Garuda bisa punya jam-jam idle begitu. Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta," tambahnya dilansir bloomberg.

Selain itu, Mufti juga melontarkan kritik keras dan tajam dalam perbaikan manajemen Garuda Indonesia. Kritik ini muncul seiring dengan berbagai masalah yang menimpa Garuda, bahkan Mufti menyebut tak masalah jika maskapai itu dibubarkan.

"Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja," katanya.

Dia menyoroti beberapa permasalahan Garuda yang dianggap tidak pernah memberikan keuntungan bagi negara. Mufti menyebut, Garuda sudah mendapatkan suntikan dana segar dari Danantara sebesar Rp6,6 triliun. Kata dia, dengan suntikan dana tersebut seharusnya Garuda dapat memberikan market share serta keuntungan yang berlipat.

"Mengenai 50% menguasai pasar domestik, buat kami ini mustahil.

Sekarang saja baru 11%, di atas swasta 60%. Maka kami tidak mau ini jadi omon-omon," tegasnya.

Mufti juga mengatakan sangat tidak setuju dengan rencana penggabungan Pelita Air ke entitas Garuda Indonesia Group. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Mufti menilai pelayanan Pelita Air sangat baik mulai dari ketepatan waktu, kebersihan, hingga makanan yang menurutnya perlu dipertahankan.

"Soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal ini, Pak. Jujur ketika terdesak, ketika saya sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air ya, tepat waktu juga ternyata, luar biasa," tegasnya dilansir kumparan.

Oleh karena itu, Mufti meminta rencana penggabungan kedua maskapai tersebut dihentikan. Saat ini, Pelita Air masih merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). "Saya tidak mau Garuda untuk kemudian membajak Pelita Air, yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita, kemudian akhirnya rusak gara-gara kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul," lanjut Mufti.

Mufti menyebutkan, saat ini Pelita Air sudah tidak membebani kinerja keuangan induk perusahaannya. Dengan demikian, dia meminta agar kinerja baik tersebut tidak terganggu dengan rencana penggabungan maskapai BUMN.

"Sampai hari ini saya senang setelah saya naik, akhirnya saya baca-baca ini portofolio keuangan, ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi. Maka kami tidak mau Pelita Air diperbaiki untuk bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita, kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengatakan meskipun ia mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait



Suasana rapat dengar pendapat Garuda Indonesia bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (22/9/2025). (antara)

merger maskapai BUMN, ia meminta agar rekam jejak Pelita Air yang tidak tergerus setelah digabungkan ke Garuda Indonesia.

"Kalaupun nantinya Pelita Air masuk ke Garuda, tolong berikan keyakinan kami tidak akan terpengaruh dengan budaya yang kurang oke selama ini, bahwa Garuda berevaluasi menjadi lebih baik," ujar Kawendra.

Sementara itu, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA), Reza Aulia Hakim menepis tuduhan keberadaan mafia yang melakukan jual beli jam penerbangan favorit di industri maskapai Indonesia.

Ia menyebut ketiadaan Garuda untuk penerbangan jam tertentu berkaitan dengan kurangnya jumlah armada. "Saya rasa ini terkait bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap hadirnya Garuda di waktu-waktu yang memang prime time," kata Reza pada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Senin (22/9/2025) dilansir bloomberg.

Menurutnya, kurangnya frekuensi penerbangan ke satu destinasi menyebabkan anggapan bahwa Garuda tidak memiliki jadwal di waktu-waktu tertentu. Meski demikian, Reza menekankan bahwa Garuda akan melakukan pengecekan jadwal agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

"[Tidak ada mafia] kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pengajuan slot atau rute saat ini sangat-sangat disupport, berlangsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenhub (Kementerian Perhubungan)," jelasnya.

Di satu sisi, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Wamildan Tsani Panjaitan, berkunjung ke Amerika Serikat untuk melakukan diskusi lanjutan soal rencana pengadaan pesawat dengan pabrikan Boeing.

Reza mengatakan pihaknya terus menjajaki kerja sama dengan

pabrikan pesawat untuk penambahan armada secara jangka panjang agar Garuda Indonesia mendapatkan kepastian jumlah pesawat, dan tentunya harga yang lebih kompetitif.

"Dalam rangka keperluan kerja sama jangka panjang inilah Bapak Direktur Utama (Dirut) kami hari ini mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan diskusi lanjutan terkait rencana pengadaan armada pesawat dari Boeing," ujar Reza. (ant,ist/lut)



Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja,"

Mufti Anam

Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI

SKANDAL BLBI- 2 DESA DI BOGOR JADI JAMINAN UTANG DAN DILELANG

Mengejutkan, dua desa yakni Desa Sukaharja dan Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor terancam dilelang karena lahannya diagunkan di kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tak hanya itu, ternyata lokasi yang sama juga dinyatakan sebagai Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan kawasan hutan oleh Kemenhut.



Kepala Dinas PM Desa Provinsi Jabar, Mochamad Ade Afriandi (kiri) di Desa Sukawangi. Dok: Dinas PM Desa Provinsi Jabar

Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes), Yandri Susanto, kepada Komisi V DPR RI, Selasa (16/9/2025).

Menurut Yandri, desa itu adalah Desa Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jabar, Mochamad Ade Afriandi, / turun ke desa tersebut untuk mengumpulkan informasi, Senin (22/9/2025).

Meski Yandri menyebut nama Desa Sukawangi, tapi sekarang ini namanya

sudah pecah menjadi Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya.

"Dulunya memang itu satu desa, tapi ada pemekaran di tahun 1980," kata Ade.

"Yang terkenal nama Sukawangi karena memang yang dilihat di peta itu tertulisnya 'Sukawangi'," ujar Ade.

Terdapat 13 ribu penduduk di dua desa tersebut, telah turun temurun sejak lama. "Penduduk telah mendiami lokasi tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka," ujarnya. Lokasi desa ini ada di dekat Jonggol, tidak jauh dari Puncak 2 Jonggol.

Ade menyebut desa tersebut bukan cuma kena masalah agunan, namun terdapat masalah-masalah

lain.

Pertama masalah Agunan. Tahun 1983, terdapat perjanjian akta kredit antara PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu atas nama Haji Mohammad Madrawi dengan PT Bank Perkembangan Asia (BPA). Direktur bank tersebut bernama Lee Dharmawan alias Lee Chian Kiat.

Kredit tersebut pun cair sebesar Rp 850 juta. Lahan 406 hektare pun dijadikan agunan kredit tersebut oleh Madrawi.

"Haji Madrawi ini, menurut warga atau menurut perangkat desa, adalah pekerja atau pegawai dari Lee Chian Kiat. Kalau kita berspekulasi, tidak mungkin (hanya) mereka berdua, mungkin di pemerintah desa dulunya

juga ada keikutsertaan (kongkalikong) karena kok bisa dengan bukti girik Letter C bisa diterima jadi agunan?" kata Ade.

Apa barang bukti terkait akad kredit itu? "Letter C girik nomor 1 sampai 700, tidak ada nama. Diklaim seolah-olah itu milik Haji Madrawi gitu."

Dijelaskan, masalah kredit tersebut bermula menjadi masalah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Diketahui Lee Chian Kiat adalah terpidana kasus BLBI.

Dalam kasus BLBI itu, Lee yang merupakan mantan Direktur Bank BPA periode 1979-1984, divonis berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1622 K/Pid/1991 pada 21 Maret 1992.

Putusannya, aset-aset Lee akan dirampas untuk negara dan diserahkan kepada BI. "Yang masuk BLBI itu posisi sekarang namanya Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Prosesnya oleh Satgas BLBI dan Kejaksaan Agung," ujar Ade.

"Saya baru turun dari Desa Sukaharja bertemu dengan perangkat desa, bahkan ada perangkat desa yang tanahnya pun dilelang sama BI padahal tidak pernah bertransaksi," kata Ade. (wud,rls,ist/dya)

Rumah Aspirasi Cak Ji

SAAT WARGA SURABAYA MENUKAR KELUH DENGAN HARAP



Suasana ramai di Rumah Aspirasi Wakil Walikota Surabaya, Armuji Jalan Wali Kota Mustajab No. 78 Surabaya.

Di ruang itu, Wakil Walikota Surabaya, Ir. Armuji atau akrab disapa Cak Ji menyambut mereka tanpa jarak. Dengan sapaan khas, "ono opo rek, ono opo (ada apa, ada apa, Red)?"

Dia mendengarkan setiap cerita yang mengalir. Bagi sebagian warga, rumah aspirasi ini serupa pasar, bukan pasar barang, melainkan pasar aspirasi. Keluhan dan harapan bertukar, solusi dijabarkan, dan kejujuran ditawarkan.

Fenomena ini bukan sekadar agenda rutin. Catatan per 4 Maret 2025 misalnya, ada 24 pengaduan yang masuk. Mulai dari sengketa tanah, penipuan jual beli rumah, hingga aduan pensiunan guru soal pesangon. Dari jumlah itu, enam kasus ditetapkan prioritas untuk ditangani dengan melibatkan organisasi

perangkat daerah (OPD) terkait hingga advokat dari Peradi. Beberapa di antaranya bahkan kasus lama yang sudah berlarut hingga lima tahun.

Yang membuat berbeda, Cak Ji tidak membiarkan keluhan hanya berakhir di catatan administrasi. Ia kerap langsung menelpon dinas terkait di hadapan warga. Jika bisa diselesaikan saat itu juga, dilakukan tanpa menunggu rapat berlapis. Namun, bila memang di luar kewenangannya, ia tidak mengumbar janji manis. "Nek gak isok, tak tegesi gak isok," ujarnya tegas dengan bahasa Arek.

Sikap blak-blakan itu membuat warga merasa dihargai. Meski tak semua masalah selesai seketika, setidaknya ada pejabat yang hadir dan jujur menyampaikan batasan. "Di sini saya merasa didengar. Kalau lewat laporan resmi seringnya berbulan-bulan tidak ada kabar," kata Siti, warga Tambaksari yang mengadu soal sengketa rumah.

Rumah aspirasi ini sekaligus

menjadi bantahan terhadap stigma bahwa Armuji hanya 'pejabat konten' yang gemar tampil di media sosial. Justru di balik layar gawai, ada ruang nyata di mana ia berinteraksi langsung dengan rakyat tanpa sekat. Bahkan beberapa praktik nakal birokrasi ter bongkar berkat laporan yang disampaikan warga.

Meski begitu, kritik tetap ada. Sebagian menilai rumah aspirasi hanyalah panggung politik untuk mendongkrak popularitas. Namun, fakta banyak kasus yang ditangani tidak memberi keuntungan politik instan, justru memperlihatkan keseriusan agenda ini.

Bagi Armuji, rumah aspirasi adalah wujud nyata politik kerakyatan yang diwarisi dari tradisi PDI Perjuangan. "Demokrasi tidak hanya soal mencoblos lima tahun sekali. Demokrasi juga soal pejabat mau membuka pintu setiap saat bagi rakyatnya," ujarnya dalam salah satu pertemuan. Pradhita/Dya)

RESMI! KEMNAKER LARANG SYARAT 'GOOD LOOKING' DI LOWONGAN KERJA

Lowongan kerja (Loker) sering kali mencantumkan syarat bagi pelamar 'good looking' dengan berpenampilan menarik hingga tinggi badan minimal. Namun, syarat semacam ini sudah dilarang oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, menyebutkan perusahaan wajib fokus ke kompetensi, bukan hal-hal yang diskriminatif.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan soal larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja. Syarat berpenampilan menarik, minimal tinggi badan hingga status pernikahan resmi kini dilarang.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025. Kemnaker menegaskan perusahaan harus fokus ke kompetensi bukan hal yang diskriminatif selama proses rekrutmen.

"Era Baru Rekrutmen Tanpa Diskriminasi! Rekanaker, masih inget lowongan kerja dengan syarat aneh-aneh kayak: "berpenampilan menarik", tinggi badan minimal, atau bahkan harus single? Tenang, sekarang udah ada aturan baru yang banjir keadilan! Lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, perusahaan wajib fokus ke kompetensi, bukan hal-hal yang diskriminatif. Tujuannya? Biar rekrutmen makin fair, objektif, dan bantu tekan angka pengangguran," tulis unggahan akun Instagram @kemnaker, dilihat Senin (22/9/2025).

Sebelumnya, Kemnaker lebih dulu mengeluarkan surat edaran Nomor M/5/HK.04/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

Dengan aturan baru ini, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk ke industri kerja.

Pakar Ekonomi Ketenagakerjaan IPB University, Dr Tanti Novianti, mengatakan larangan diskriminasi dalam lowongan kerja penting untuk mendorong dunia kerja yang adil. Kebijakan ini dinilai bukan aturan yang membebani pelaku usaha.

"Di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, perusahaan yang mampu membuka akses kerja bagi semua kalangan, tanpa memandang usia, gender, disabilitas tentunya akan mendapatkan keuntungan strategis, yakni reputasi yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beragam hingga loyalitas tenaga kerja yang tinggi," jelasnya dikutip dari laman resmi IPB University, Senin



Unjuk rasa buruh KSPSI dan KSPI di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). Ist

(22/9/2025).

Dia melanjutkan, kebijakan ini bisa membuka peluang lebih luas bagi pekerja berusia di atas 30 tahun, yang selama ini kesulitan masuk industri kerja.

Meski begitu, Dr Tanti mencatat,

kebijakan perlu diuji lebih lanjut. Sebab, implementasi kebijakan ini berpotensi menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan karakteristik industri.

"Komitmen dan konsistensi perusahaan menjadi sangat krusial.

Buruh Minta Upah Naik 10,5% Tahun Depan

KONFEDERASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membahas kenaikan upah saat audiensi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/9/2025).

Sekjen KSPSI, Ramidi, menuturkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 diharap mencapai 8,5 persen hingga 10,05 persen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168.

Putusan tersebut memperhitungkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kami meminta pemerintah untuk menerbitkan upah minimum 8,5 sampai 10,5 untuk kenaikan upah minimum 2026," kata Ramidi dalam audiensi itu.

Sementara itu, Presiden KSPSI

Andi Gani Nena Wea menyampaikan, audiensi dilakukan untuk melaporkan berbagai keresahan buruh terkait peristiwa yang terjadi belakangan. Ia mengaku buruh merasakan kesedihan karena anarkisme saat demo, mengingat buruh juga berperan langsung di jalanan sebagai aktivis demokrasi. Ia memastikan bahwa saat buruh turun berdemo di jalan, tidak ada aksi anarkisme yang terjadi.

"Selama buruh turun, tidak pernah ada sesuatu yang membakar atau apapun yang terjadi. Jadi saya menegaskan di sini, dua konfederasi buruh terbesar yang mayoritas di Indonesia mendukung supremasi sipil. Apapun risikonya, kami berada di garis terdepan," ucap Andi Gani.

Di sisi lain, ia meminta DPR RI tetap menjadi rumah rakyat. DPR harus menerima masukan dan tidak boleh takut dengan bentuk intervensi manapun.

Andi juga mengundang Puan

Jika SE ini hanya bersifat imbauan, belum tentu akan ditaati seluruh pihak," imbuhnya.(wid,rls,ant/dya)

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/V/2025 Tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja

1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
3. Persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan; dan/atau
 - b. tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
4. Larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Surat Edaran Nomor M/5/HK.04/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, berikut poin-poinnya.

1. Dilarang mensyaratkan/menahan ijazah atau dokumen pribadi (misal paspor, akta, sertifikat, STNK).
2. Dilarang menghalangi pekerja mencari pekerjaan lebih layak.
3. Calon pekerja harus teliti isi perjanjian kerja, terutama soal ijazah/dokumen.
4. Pengecualian hanya jika:
 - Ijazah/sertifikat dibiayai pemberi kerja lewat perjanjian tertulis;
 - Pemberi kerja wajib menjamin keamanan dan ganti rugi bila hilang/rusak.

Maharani untuk hadir dalam apel kebangsaan pada tanggal 8 Oktober 2025 mendatang. Apel itu rencananya dihadiri oleh 100.000 buruh. "Apel besar kebangsaan Indonesia ini akan dihadiri 100.000 buruh di basis kekuatan kami di Jawa-Bekasi. Yang akan dihadiri 100.000 buruh untuk menegaskan NKRI harga mati. Supremasi sipil adalah segalanya buat kami," jelas Andi Gani.

Kemudian, aspirasi lain yang disampaikan adalah RUU Ketenagakerjaan. Andi meminta DPR RI punya andil untuk mempercepat pengesahannya karena ia merasa saat ini direspons cenderung lambat. "RUU Ketenagakerjaan ini kami (rasa) agak lambat menerima respons dari DPR. Tapi tadi saya diberitahu oleh wakil kami, Pak Ginto, besok ada pertemuan dengan Komisi 9. Besok juga kami akan hadir semua di Komisi 9 untuk menyampaikan beberapa pokok pemikiran kami," jelas Andi Gani. (wid,ist,sin/dya)

MENANTI KEPASTIAN STATUS LAHAN 8,9 HA UNTUK SEKOLAH RAKYAT PERMANEN KOTA MALANG

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan lahan seluas 8,9 hektare (Ha) di Jalan Mayjend Sungkono, Kedungkandang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen. Namun, status pemanfaatan tanah tersebut masih menunggu penetapan skema pemerintah pusat, apakah melalui hibah atau pinjam pakai.

"Kami lihat nanti skemanya bagaimana. Kalau yang di Poltekomp itu kan pinjam pakai. Sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pinjam pakai antara Wali Kota dengan Mensos," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, Senin (22/9/2025).

Untuk diketahui, bangunan sementara Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16, terletak di area kampus Politeknik Kota Malang (Poltekomp). SRMP ini telah memulai aktivitas pembelajaran di tahun pertama sejak 14 Juli 2025 lalu, dengan jumlah peserta didik sebanyak 100 siswa dari desil 1.

"Ya, Sekolah Rakyat yang sekarang di Poltekomp, ini kan sifatnya sementara.

Nanti akan ada yang dibangun untuk menjadi permanen, yang di sebelahnya BPBD, itu di Jalan Mayjend Sungkono, Kedungkandang," katanya.

Subkhan menyampaikan, karena program tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), maka Pemkot Malang akan mengikuti skema yang ditetapkan. Menurutnya kedua opsi, baik hibah maupun pinjam pakai, memungkinkan untuk diterapkan.

"Ya, intinya, ini kan kami siapkan dulu. Kalau sudah oke, kami tunggu skemanya. Kalau kemudian diminta menghibahkan ya kami hibahkan. Kalau cukup dengan pinjam pakai lahan, ya silakan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya, dalam skema pinjam pakai, tidak ada biaya sewa yang dibebankan kepada pemerintah pusat. Subkhan menjelaskan, lahan yang dipinjam pakai akan tetap berstatus sebagai barang milik daerah (BMD) Kota Malang. Sementara pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemegang.

"Lain-lainnya seperti pemeliharaan dan sebagainya, itu

adalah kewajiban dari pemegang. Tetapi catatan asetnya tetap di BMD. Kalau hibah, ya full sudah (pemeliharaan dan catatan aset masuk ke pusat)," imbuhnya.

Disinggung mengenai kepastian pembangunan SR permanen tersebut, Subkhan mengaku tidak mengetahui secara pasti. Menurutnya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia kembali menekankan, peran Pemkot Malang hanya pada aspek penyiapan siswa dan penyediaan lahan. Sementara kapan waktu pekerjaan proyek dimulai, menjadi keputusan pusat.

"Pemkot itu kan menyiapkan siswanya, itu dari Dinsos. Termasuk



Lahan bakal Sekolah Rakyat permanen di Kota Malang, Jalan Mayjend Sungkono, Kedungkandang. (dok. Ist)

juga untuk menyiapkan lahan, itu kami diminta pemerintah pusat. Lain-lainnya, itu wewenang pemerintah pusat. Apakah saat ini sudah masuk lelang atau bagaimana, kami belum tahu," jelasnya. (Santi/Dya)

JABATAN KADINKES KABUPATEN MALANG DIPASTIKAN KEMBALI KE WIYANTO WIJOYO



Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. (Santi/Lentera)

MALANG - Eks Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dipastikan segera dikembalikan ke jabatannya. Hal ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Alhamdulillah putusan MA sudah keluar. Dari hasil konsultasi kami,

rekomendasi dari BKN juga sudah turun. Sehingga kami harus menjalankan putusan MA tersebut," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Senin (22/9/2025).

Menurut Tomie, Pemkab Malang saat ini tengah memproses pelaksanaan putusan tersebut. Ia meminta semua pihak, termasuk dokter Wie, sapaan akrab eks Kadinkes, itu untuk bersabar karena pengembalian jabatannya hanya tinggal menunggu waktu pelantikan.

"Ini sedang berproses untuk saudara Wiyanto, agar bisa sesuai dengan yang diputuskan MA. Insyaallah sesegera mungkin nanti Pak Wie akan kembali pada posisi seperti yang diarahkan putusan MA," jelasnya.

Beberapa hari sebelumnya, Bupati Malang, Sanusi mengaku belum dapat

memastikan apakah Wiyanto akan dikembalikan pada jabatannya semula.

Namun saat ini, Tomie yang juga menjabat sebagai koordinator Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemkab Malang, ini memastikan yang bersangkutan akan kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. "Ya, Kepala Dinas Kesehatan," ujarnya singkat.

Meski begitu, Tomie belum bisa memastikan kapan pelantikan akan dilakukan. Menurutnya, ada kemungkinan pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengisian jabatan tinggi pratama (JTP) lain yang masih kosong. Namun, hal itu masih dalam pembahasan internal.

"Kalau dimungkinkan bersama ya bisa. Tapi kalau terlalu lama, mungkin yang Pak Wie bisa disegerakan. Nggak ada batasan waktunya. Sesegera mungkin. Bisa jadi akhir September ini," katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memerintahkan Bupati Malang selaku terbanding untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor

800.1.6.3/148/35.07.405/2024 tentang pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, tertanggal 27 Maret 2024, atas nama Wiyanto Wijoyo.

Selain itu, MA juga mewajibkan penerbitan SK baru yang merehabilitasi serta mengangkat kembali Wiyanto dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang atau jabatan lain yang setara.

Kasus pencopotan Wiyanto sendiri bermula dari pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) pada Februari 2023. Saat itu, sekitar 25 persen penduduk Kabupaten Malang belum tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS.

Untuk memenuhi target UHC, warga yang belum terdaftar harus dimasukkan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Namun, karena data baru masuk pada Februari 2023, kebutuhan anggaran tidak tercantum dalam APBD murni 2023 dan baru direncanakan masuk pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). (Santi/Dya)

ISRAEL ANCAM LAKUKAN ANEKSASI

SEKITAR 157 NEGARA AKUI PALESTINA

Pemerintah Israel kembali mengancam akan menganeksasi Tepi Barat sebagai tanggapan terhadap rencana beberapa negara Barat yang berniat mengakui Palestina dalam Sidang Umum PBB minggu ini.

Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, intensitas operasi militer dan kekerasan yang dilakukan Israel di Tepi Barat semakin meningkat.

Saat ini, Tel Aviv menegaskan kemampuan mereka untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menganeksasi wilayah tersebut guna memberi tekanan kepada negara-negara yang berencana mengakui Palestina secara resmi.

Selain itu, meski dikenal sebagai sekutu dekat Israel, Amerika Serikat tidak secara terbuka menentang rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan, Washington telah memperingatkan sejumlah pemerintah Eropa dan negara lain mengenai dampak dari pengakuan Palestina.

"Negara-negara itu dapat menghadapi respons keras dari pemerintahan Netanyahu," ujar Rubio, dikutip dari Anadolu Agency pada Minggu (21/9/2025).

Namun, Rubio juga menegaskan bahwa AS tidak akan mengambil langkah langsung untuk mencegah potensi aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Menurutnya, pengakuan Palestina oleh negara-negara Eropa justru akan semakin mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

Sementara itu, sejak deklarasi kemerdekaan pada 15 November 1988, Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel telah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.

Dengan adanya pengumuman terbaru, jumlah itu diperkirakan bertambah menjadi 157 negara. Inggris, Kanada, dan Australia sudah mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina pada Minggu (21/9/2025).

Langkah tersebut dipandang sebagai titik balik penting dalam dinamika internasional, khususnya karena ketiga negara tersebut selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat.

Sidang Umum PBB

Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York pada Senin (22/9/2025)

menjadi panggung penting bagi isu pengakuan negara Palestina.

Para pemimpin dunia akan berkumpul tidak hanya untuk menghadiri sidang, tetapi juga berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian damai konflik Palestina-Israel serta upaya implementasi solusi dua negara.

Pengakuan resmi terhadap Palestina juga dijadwalkan diumumkan oleh beberapa negara Eropa lain, antara lain Perancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

Pengakuan beruntun dari negara-negara Barat tersebut menambah tekanan internasional terhadap Israel yang terus dikritik atas operasi militernya di Gaza dan kebijakan pendudukannya di Tepi Barat.



Para pemukim Israel menggunakan bulldoser untuk membuka jalan menuju permukiman baru di pinggiran desa Al Mughayyir, Tepi Barat yang diduduki, utara Ramallah, Minggu (24/8/2025). (AFP)

Namun, Netanyahu selama ini tetap bersikap menantang. Dengan mengancam aneksasi, ia berusaha menunjukkan bahwa setiap pengakuan terhadap Palestina tidak akan mengubah fakta di lapangan, di mana Israel masih mengendalikan wilayah strategis Tepi Barat.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Israel untuk mempertahankan status quo dan menekan kemungkinan terciptanya momentum diplomasi baru bagi Palestina di kancah internasional. (Anadolu Agency, ist/nei)

Negara Terbaru yang Mengakui Palestina

Negara	Status Pengakuan
Portugal	Resmi
Inggris	Resmi
Kanada	Resmi
Australia	Resmi
Malta	Akan mengakui
Denmark	Akan mengakui
Slovenia	Resmi
Norwegia	Resmi
Spanyol	Resmi
Irlandia	Resmi

Prancis dan Saudi Gelar Two State Solution di New York



Menlu Prancis Jean-Noel Barrot dalam pertemuan mengenai Palestina-Israel di markas PBB di New York, AS, (28/7/2025). (Foto: Anadolu Agency)

PRANCIS dan Arab Saudi dijadwalkan mengumpulkan puluhan pemimpin dunia pada Senin (21/9/2025) di markas PBB, New York, untuk membahas dukungan terhadap solusi dua negara, yakni hidup berdampingan secara merdeka dan damai.

Israel bersama Amerika Serikat dikabarkan akan memboikot pertemuan yang membahas dukungan terhadap solusi dua negara. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, bahkan menyebut forum tersebut sebagai sebuah

sirkus.

"Kami tak berpikir itu akan membantu. Kami berpikir itu memberikan hadiah bagi terorisme," kata Danon.

Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat yang menjadi sekutu dekat Israel, memberikan peringatan keras bahwa akan ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang menentang Israel. Teguran tersebut juga diarahkan kepada Prancis.

Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Pada saat yang sama, Israel melancarkan operasi darat di Gaza City, sementara berbagai negara mendorong adanya gencatan senjata untuk menghentikan konflik di wilayah tersebut.

Di tengah semakin intensifnya serangan Israel ke Gaza, sejumlah negara mencoba terus mengangkat two state solution sebagai jalan

keluar krisis Israel-Palestina.

Majelis Umum PBB bahkan sudah mendukung deklarasi tujuh halaman menuju two state solution pada bulan ini. Mereka juga mengutuk Hamas dan meminta kelompok penguasa Gaza menyerah dan menyerahkan seluruh senjatanya.

Sementara itu, Prancis yakin pertemuan khusus pada Senin ini di New York akan berbuah positif terhadap penyelesaian krisis Israel-Palestina termasuk Gaza.

"Deklarasi New York bukanlah janji samar untuk masa depan yang jauh, melainkan sebuah peta jalan yang dimulai dengan prioritas utama: gencatan senjata, pembebasan sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza," ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot seperti dikutip dari Reuters.

"Setelah gencatan senjata dan pembebasan sandera tercapai, langkah selanjutnya adalah rencana untuk hari berikutnya, yang akan menjadi agenda diskusi hari Senin," sambung dia. (Reuters, ist/dya)

Penyakit Lyme, Gangguan Kesehatan Diderita Bella Hadid

Supermodel Bella Hadid sudah cukup lama berhadapan dengan penyakit Lyme, yakni gangguan kronis yang ditularkan melalui gigitan kutu. Walau sering tampil menawan di runway internasional bersama brand ternama seperti Dior dan Versace, di balik sorotan lampu ia tetap harus melawan masalah kesehatan yang tidak tampak dari luar.

Bella Hadid diketahui pertama kali didiagnosis menderita penyakit Lyme saat berusia 16 tahun, meski tandatanya sudah muncul sejak ia berumur 14 tahun. Dalam sebuah unggahan di Instagram, ia bercerita bahwa dirinya merasakan hampir 30 gejala setiap hari, mulai dari sakit kepala, sulit tidur, kabut otak, rasa cemas, mual, hingga nyeri pada persendian.

Gejala yang Melemahkan

Penyakit Lyme dapat menimbulkan gejala parah meski sulit terlihat dari luar. Yolanda Hadid, ibunya, mengungkapkan meski Bella kerap tidur lebih dari 12 jam, tetapi tetap merasakan kelelahan ekstrem, nyeri sendi, serta sering lupa sesaat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Tidak ada kata yang cukup besar untuk menggambarkan kegelapan, rasa sakit, dan neraka tak dikenal yang dialami Bella," tulis Yolanda di Instagram pada September 2025, setelah putrinya kembali dirawat di rumah sakit.

Penyakit Lyme tidak hanya dialami Bella. Sang ibu, Yolanda, dan adiknya, Anwar Hadid, juga memiliki diagnosis

serupa. Dalam sebuah acara amal tahun 2015, Yolanda menyatakan tekadnya untuk mendukung anaknya melewati penyakit kronis ini.

Masa Pemulihan

Pada Agustus 2023, Bella mengumumkan bahwa ia merasa "akhirnya sehat" setelah menjalani lebih dari 100 hari perawatan intensif. Ia mengambil jeda dari dunia modeling untuk fokus pada kesehatannya, dan kakaknya, Gigi Hadid, memberi dukungan penuh atas proses pemulihannya. Namun, hampir dua tahun kemudian, Bella kembali menjalani rawat inap.

Melalui unggahan Instagram, ia membagikan foto dari ranjang rumah sakit dengan selang infus terpasang, sambil menuliskan pesan singkat kepada penggemar. "Maaf, aku selalu menghilang. Aku sayang kalian," tulisnya pada unggahan Instagram, 18 September 2025.

Gejala dan Penyebab

Dikutip dari Mayo Clinic, penyakit Lyme adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Borrelia*. Penularan penyakit Lyme kepada manusia melalui gigitan kutu yang membawa bakteri tersebut. Umumnya penyebaran penyakit ini terjadi di Amerika Serikat, Atlantik tengah, Eropa, dan Kanada. Risiko tertular jika sering menghabiskan waktu di area berumput, semak belukar atau hutan.

Gejala penyakit Lyme bervariasi, dan biasanya muncul secara bertahap. Gejala awal biasanya muncul dalam 3

hingga 30 hari setelah gigitan kutu, berupa ruam, lingkaran tunggal yang perlahan menyebar dari lokasi gigitan kutu. Lalu dapat menjadi bening di bagian tengah dan tampak seperti target atau sasaran tembak. Ruam sering terasa hangat saat disentuh, tetapi biasanya tidak nyeri atau gatal.

Pengobatan

Penanganan penyakit Lyme paling efektif dilakukan sejak stadium awal, karena pada fase ini infeksi masih lebih mudah dikendalikan. Biasanya, dokter akan memberikan antibiotik oral dengan durasi pengobatan antara 14 hingga 21 hari.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa gejala yang dialami pasien tidak selalu hilang meskipun terapi antibiotik sudah dijalankan. Beberapa keluhan, seperti rasa lelah atau nyeri otot, dapat bertahan untuk sementara waktu. Hal ini tidak selalu menandakan pengobatan gagal, melainkan bagian dari proses pemulihan tubuh.

Pencegahan

Pencegahan penyakit Lyme pada umumnya dilakukan dengan cara meminimalisir kemungkinan paparan gigitan kutu. Beberapa langkah bisa dilakukan untuk mencegah sekaligus menangani gigitan kutu. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan celana panjang dan baju berlengan panjang agar kulit lebih terlindungi. Pastikan halaman rumah bebas dari kutu dengan

membersihkan kayu dan meletakkannya di area yang terkena sinar matahari, memangkas rumput secara teratur, serta menjaga agar tidak tumbuh terlalu panjang.

Selain itu, gunakan penangkal serangga dengan kandungan DEET 10 persen yang efektif melindungi selama dua jam, dan ingat untuk mengaplikasikannya kembali jika berada di luar ruangan lebih lama. Jangan lupa memeriksa kulit secara rutin untuk mendeteksi adanya gigitan kutu.

Diagnosis

Diagnosis penyakit Lyme dilakukan berdasarkan wawancara dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan darah kurang akurat sampai beberapa minggu setelah infeksi pertama. Hal ini dikarenakan antibodi terhadap bakteri penyebab penyakit Lyme (*nei,ist/dya*)



Ilmuwan Latih AI untuk Prediksi Risiko Ribuan Penyakit

Para peneliti dari Inggris, Denmark, Jerman, dan Swiss memperkenalkan sebuah model kecerdasan buatan (AI) yang disebut mampu memprediksi risiko lebih dari 1.000 jenis penyakit.

Model tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan data dari UK Biobank, yakni basis data biomedis di Inggris yang mencakup hampir satu juta peserta, lalu diuji kembali pada sekitar 1,9 juta rekam medis penduduk Denmark tanpa melakukan penyesuaian parameter.

Ahli AI dari German Cancer Research Center, Moritz Gerstung, menjelaskan bahwa kecerdasan buatan ini mempelajari pola urutan diagnosis layaknya memahami "tata bahasa" dalam sebuah teks.

Delphi-2M mempelajari pola munculnya serta keterkaitan antar-diagnosis, sehingga mampu memberikan "prediksi yang sangat relevan bagi kesehatan," ujar dia seperti dilansir Science Alert.

Model ini mampu mengidentifikasi individu dengan risiko serangan jantung yang jauh lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan perkiraan

berdasarkan usia dan faktor umum lainnya.

Namun, para peneliti menekankan bahwa Delphi-2M masih berada pada tahap pengembangan dan belum layak untuk digunakan secara luas.

"Masih jauh menuju perbaikan layanan kesehatan," ujar mereka, seraya mengakui basis data Inggris dan Denmark memiliki bias umur, etnisitas, dan luaran layanan kesehatan.

Peneliti teknologi kesehatan di Institution of Engineering and Technology Inggris Peter Bannister, menilai keterbatasan tersebut perlu diatasi. Sistem seperti Delphi-2M kelak bisa membantu

pemantauan dan intervensi lebih dini dalam kerangka pengobatan preventif.

Pada skala yang lebih besar, menurut Tom Fitzgerald dari European Molecular Biology Laboratory, alat semacam ini berpotensi membantu optimasi sumber daya di sistem kesehatan yang kian besar.

Konsep penilaian risiko berbasis komputer seperti ini sebenarnya bukan yang pertama. Di klinik dokter umum di Inggris, misalnya, memakai QRISK3 untuk mengukur risiko serangan jantung atau stroke.

Berdasarkan penjelasan dalam jurnal Nature berjudul Learning the natural history of human disease with generative transformers, Delphi-2M bekerja dengan merepresentasikan perjalanan kesehatan seseorang sebagai rangkaian kode diagnosis ICD-10, usia saat didiagnosis, serta faktor seperti jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol.

Dengan pendekatan generatif, model ini juga bisa menyintesis lintasan kesehatan masa depan hingga 20 tahun, memberikan estimasi beban penyakit potensial pada tingkat individu maupun populasi tanpa mengekspos data pribadi.

Uji performa menunjukkan Delphi-2M cukup akurat. Tim juga menampilkan metode explainable AI (SHAP) guna menafsirkan prediksi model, termasuk kluster komorbiditas lintas bab ICD-10 dan konsekuensi waktunya terhadap risiko penyakit di masa depan.

Profesor spesialis AI medis dari King's College London Gustavo Sudre, menyebut riset ini penting guna menciptakan teknologi yang bertanggung jawab dan etis di masa depan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25,000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Trik Feather Stroke untuk Alis Natural On Point

Alis kerap dijuluki sebagai “bingkai wajah” karena dapat mengubah tampilan seseorang secara seketika. Tidak mengherankan jika banyak orang rela meluangkan waktu khusus untuk memperbaiki atau menggambar alis demi terlihat lebih menarik. Meski begitu, masih banyak yang merasa kesulitan membuat alis tampak rapi dan natural tanpa terlihat terlalu tebal, kaku, atau seolah-olah “digambar”.

Sementara itu, terdapat teknik populer bernama feather stroke. Teknik ini menekankan cara menggambar garis-garis tipis yang menyerupai helaian rambut alis alami. Hasilnya, alis terlihat lebih lembut dan terisi penuh, namun tetap memberi kesan natural tanpa berlebihan sempurna digunakan baik untuk aktivitas harian maupun momen spesial.

Rahasia utama untuk mendapatkan tampilan alis yang natural dan rapi terletak pada ketelitian serta pemilihan produk yang sesuai. Gunakan alat seperti pensil alis dengan ujung runcing atau brow pen berbentuk cair agar garis-garis yang dibuat tampak lebih halus, presisi, dan menyerupai helaian rambut asli. Produk dengan ujung yang tipis juga memudahkan dalam mengontrol sapuan, sehingga bentuk alis tidak mudah terlihat berlebihan.

Dengan latihan rutin, Anda bisa menguasai teknik ini dan menciptakan tampilan alis yang on point setiap hari. Hasilnya akan terlihat profesional layaknya perawatan salon, namun tetap praktis dilakukan di rumah. Selain menghemat waktu dan biaya, Anda juga memiliki kendali penuh atas bentuk alis sesuai keinginan.

Teknik Feather Stroke

Feather stroke merupakan teknik mengisi alis yang berbeda dengan metode pengisian penuh. Alih-alih menutup seluruh bagian alis, teknik ini lebih menonjolkan garis-garis tipis yang mengikuti arah pertumbuhan rambut alami. Dengan begitu, hasilnya tampak lebih ringan dan tidak kaku.

Efek yang ditampilkan dari feather stroke terlihat transparan, menyerupai helaian rambut asli. Hal ini membuat alis terlihat lebih hidup, seolah-olah tumbuh secara alami. Teknik ini banyak dipilih karena mampu memberikan tampilan yang lembut sekaligus tetap rapi.

Bagi Anda yang ingin tampil natural tanpa kesan alis terlalu tebal atau berat, feather stroke bisa menjadi pilihan tepat. Dengan hasil yang halus dan tidak mencolok, teknik ini membuat bentuk alis terlihat selaras dengan wajah, sehingga memberikan kesan segar dan menawan tanpa berlebihan.

Pahami Proporsi Wajahmu

Langkah pertama untuk menciptakan alis yang natural adalah memahami titik-titik penting pada wajah. Caranya dengan menarik garis imajiner dari sisi lubang hidung ke bagian awal alis untuk menentukan posisi start yang tepat. Selanjutnya, untuk menemukan bagian arch atau puncak alis, tarik garis lurus dari lubang hidung melewati pupil mata.

Sementara itu, posisi ujung ekor alis dapat ditentukan dengan menarik garis dari lubang hidung sejajar ke arah sudut luar mata. Dengan mengikuti trik sederhana ini, bentuk alis akan tampak lebih proporsional sehingga mampu menyeimbangkan tampilan wajah secara keseluruhan.

Rapikan Area Alis dengan Lembut

Membersihkan area sekitar alis merupakan kunci untuk mendapatkan tampilan yang lebih rapi dan teratur. Anda bisa menggunakan razor kecil untuk menghilangkan bulu-bulu halus (peach fuzz) di sekitar alis agar area tersebut tampak bersih dan mulus.

Langkah sederhana ini membantu hasil makeup terlihat lebih halus tanpa perlu mencabut alis secara berlebihan. Dengan begitu, bentuk alis alami tetap terjaga namun tetap terlihat tegas dan terawat.

Persiapkan Alis dengan Primer dan Bedak

Sebelum mulai menggambar alis, aplikasikan sedikit eye shadow primer lalu taburi bedak tipis di area alis. Langkah ini berfungsi sebagai dasar agar produk yang digunakan dapat menempel lebih baik, terutama pada bagian alis yang jarang atau memiliki celah. Dengan cara tersebut, riasan alis akan tampak lebih merata

sekaligus tahan lebih lama. Hasilnya, alis tetap rapi dan terlihat segar sepanjang hari tanpa perlu banyak sentuhan ulang.

Gunakan Alat yang Tepat

Pilihlah kuas alis yang ultra tipis agar dapat menciptakan garis halus menyerupai helaian rambut asli. Hindari menggunakan kuas yang terlalu lebar karena sapuannya akan terlihat tebal dan sulit menghasilkan tampilan alis yang natural. Setelah itu, ambil sedikit pomade alis dan letakkan di bagian tutup wadahnya. Gunakan permukaan tutup sebagai media untuk meratakan sekaligus mengontrol jumlah produk, sehingga hasil sapuan kuas lebih presisi tanpa berlebihan.

Ikuti Arah Tumbuh Alis

Saat menggambar alis, gunakan tekanan yang ringan sambil membuat garis-garis tipis mengikuti arah pertumbuhan rambut alami. Mulailah dari area yang jarang rambut untuk memberikan isian dasar, lalu lanjutkan perlahan

ke bagian lain agar bentuk alis terlihat lebih merata. Untuk hasil yang natural, jaga agar setiap garis tidak lebih panjang dari ¼ inci. Dengan begitu, sapuan akan tampak menyerupai helaian rambut asli sehingga alis terlihat rapi, lembut, dan tetap natural tanpa kesan berlebihan.

Sesuaikan Warna dengan Tone Alis Asli

Banyak orang sering keliru dengan menyamakan warna alis pada warna rambut kepala, padahal yang seharusnya dijadikan patokan adalah warna alis asli. Pemilihan produk dengan tone yang sesuai baik cool tone maupun warm tone akan membuat hasil riasan terlihat lebih natural dan tidak terlalu mencolok.

(nei,ist/dya)



Menkeu Kejar Ratusan , ...dari hal 1

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan adanya 200 penunggak pajak dalam jumlah besar ini dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

"Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkraht. Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 - Rp60 triliun," ujarnya.

Purbaya mengatakan pihaknya akan mengejar para penunggak pajak itu, "Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari," imbuhnya.

Otoritas fiskal, lanjut dia, juga akan bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung, Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga akan melakukan penegakan hukum yang serius, untuk [wajib pajak/WP] non-compliance, dengan bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, hingga Polisi," tutur dia.

Masalah tunggakan pajak pengusaha ini sebelumnya juga pernah diungkap adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengungkapkan sebanyak 300 pengusaha Indonesia diduga mengemplant pajak hingga mencapai Rp300 triliun.

Prabowo, kata Hashim, mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Sebagian besar pengusaha itu berasal dari sektor sawit.

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari cncindonesia, Senin (7/10/2024).

Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan pihaknya akan mengawasi jalur-jalur impor. Jika ada kecurangan-kecurangan maka Purbaya menyatakan akan menindak, siapapun yang terlibat termasuk anak buahnya.

"Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian]

Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tuga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya," tutupnya.

Adapun Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.135,4 triliun per Agustus 2025. Angka itu 54,7% dari target APBN yang dipatok senilai Rp2.076 triliun. Penerimaan itu turun 5,1% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.196,5 triliun.

Sedangkan, Penerimaan pajak bruto kumulatif bulan Januari - Agustus 2025 tumbuh 2,1% menjadi Rp 1.442,7 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.413,4 triliun.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Akibat penerimaan pajak yang masih kontraksi 5,1%, pendapatan negara secara keseluruhan juga masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya mengungkapkan realisasi pendapatan negara sampai 31 Agustus 2025 tercatat Rp1.638,7 triliun atau merosot 7,8% dibanding realisasi pendapatan negara periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.777,3 triliun. Berdasarkan porsinya, nominal ini baru 57,2% dari target terbaru 2025, yakni Rp1.865,5 triliun.

Purbaya menyebutkan rincian pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan yang sebesar Rp1.330,4 triliun, atau merosot 3,6% secara tahunan (year-on-year/yoy). Porsinya baru 55,7% dari target Rp2.387,3 triliun.

"Penerimaan perpajakan terdiri dari realisasi penerimaan pajak Rp1.135,4 triliun atau merosot 5,1% yoy. Porsinya 54,7% dari target terbaru 2025 Rp2.076,9 triliun," kata Purbaya.

Sementara itu, realisasi bea cukai tercatat mencapai Rp194,9 triliun atau meningkat 6,4% yoy. Porsinya melampaui 62,8% dari target 2025 terbaru, yakni Rp310,4 triliun.

Selain penerimaan perpajakan, pemerintah juga membukukan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sebesar Rp306,8 triliun. Angka ini merosot 20,1% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Menurut porsinya, angka ini tercatat 64,3% dari target yang mencapai Rp477,2 triliun.

Kemenkeu juga mencatat penerimaan pajak bruto kumulatif bulan Januari - Agustus 2025 tumbuh 2,1% menjadi Rp 1.442,7 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.413,4 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor ketenagalistrikan,

pertambahan bijih logam, perdagangan online dan perdagangan besar hingga pertanian tanaman.

"Jadi teman-teman pendapatan negara per Agustus 31 adalah 57,2%, itu pencapaiannya dan penerimaan pajak 54,7% jadi tidak terlalu jauh dari average cukai 62,8% dan PNBPN 64,3% ini capaian per hari ini dibanding outlook 2025," kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

Namun, jika dilihat lebih lanjut secara neto, penerimaan pajak totalnya mencapai Rp 1.135,44 triliun. Pendapatan neto ini didapatkan setelah dikurangi oleh restitusi. "Secara bruto konsisten sejak Maret kita mengalami pertumbuhan yang positif, kalau neto angkanya 54,7% dibandingkan dengan outlook," paparnya.

Namun, penerimaan neto pajak pada bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 3,8%. Anggito menuturkan penurunan ini dipicu oleh faktor restitusi. "Jadi akan selalu ada faktor korelasi antara penerimaan bruto dan neto," tegas Anggito.

Adapun, secara bruto, PPh Badan kenaikan sebesar 7,5% menjadi Rp 280,08 triliun. Namun, secara neto, besaran PPh Badan ini turun menjadi Rp 194,20 triliun atau minus 8,7%.

Kemudian, PPh Orang Pribadi mengalami kenaikan baik secara bruto dan neto, yakni masing-masing Rp 15,98 triliun dan Rp 15,91 triliun. Capaian bruto dan neto ini meningkat masing-masing sebesar 38,8% dan 39,1%.

Lebih lanjut, PPN & PPNBM secara bruto mengalami penurunan 0,7% menjadi Rp 631,8 triliun. Sementara itu, PPN & PPNBM secara neto juga turun 11,5% menjadi Rp 416,49 triliun. "Untuk yang netonya itu ada koreksi dari restitusi," ungkap Anggito.

Menkeu Purbaya juga mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB per Agustus 2025. "Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya," ungkapnya.

Defisit ini terjadi imbas pendapatan yang baru mencapai Rp1.638,7 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 57,2 persen dari target di APBN 2025.

Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp1.330 triliun dan kepabeanaan serta cukai senilai Rp122,9 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.960,3 triliun. Jumlah tersebut setara 55,6 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Untuk meningkatkan pendapatan negara yang beberapa bulan belakangan masih berkontraksi,

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah program hasil cepat (quick win).

Purbaya memaparkan setidaknya ada enam program quick win yang disiapkannya. Pertama, penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan. Menurutnya, belakangan ini penerimaan pajak berkontraksi karena ekonomi tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Oleh sebab itu, dia meyakini penerimaan pajak berbalik positif apabila pertumbuhan ekonomi terakselerasi.

Purbaya optimis dampak positif kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan akan terasa pada tiga bulan terakhir 2025. Dengan demikian, menurutnya, penerimaan pajak juga tumbuh positif.

"Jadi saya naikin pendapatan [negara] bukan dengan naikan tarif, tapi dorong aktivitas ekonomi supaya pajak lebih besar, Anda juga enggak kerasa bayarnya. Kalau ekonominya tumbuh kencang, kan Anda bayar pajaknya happy [senang]. Itu yang kita kejar," ujar Purbaya.

Kedua, dia mengungkapkan Kementerian Keuangan juga sudah memegang daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kementerian Keuangan, sambungnya, akan segera menagih para penunggak pajak besar tersebut.

"Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari," kata Purbaya.

Ketiga, Kementerian Keuangan juga memperkuat penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keempat, Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan kementerian atau lembaga lain untuk memudahkan penagihan pajak. Kelima, optimalisasi Coretax. Purbaya meyakini bisa memperbaiki berbagai permasalahan Coretax dalam satu bulan.

"Nanti saya bawa jago-jago dari luar yang jago IT untuk perbaiki itu dengan cepat," ungkap Purbaya.

Keenam, patroli rokok ilegal. Purbaya mengaku sudah memanggil lokapasar digital seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, terutama rokok.

Selain itu, dia mengaku sudah mendeteksi siapa saja yang menjual rokok ilegal, baik dari pemasok hingga penjual di warung kelontong. "Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datang secara random," ujarnya. (han,ant,ist/lut)

TIGA NEGARA SIAGA TOPAN RAGASA, 500 PENERBANGAN DIBATALKAN

Topan Super Ragasa diperkirakan menerjang Hong Kong dengan kecepatan relatif tinggi, Senin malam dan Selasa (22-23/9/2025). Selain Hong Kong, Filipina dan Taiwan juga bersiap siaga terhadap topan yang membawa angin kencang dan curah hujan deras itu. Badai itu, membuat maskapai penerbangan Cathay Pacific membatalkan lebih dari 500 penerbangan mulai pukul 18.00 Selasa (23/9/2025) waktu setempat.



Ilustrasi angin topan.

“Mulai pukul 18.00 besok, 23 September, penerbangan penumpang Cathay Pacific yang tiba dan berangkat dari Bandara Internasional Hong Kong akan menghentikan operasinya hingga kembali beroperasi pada siang hari pada hari Kamis,” kata juru bicara maskapai tersebut dalam konferensi pers, dilansir cnnindonesia, Senin (22/9/2025).

“Lebih dari 500 penerbangan saat ini diperkirakan akan dibatalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Observatorium Hong Kong memperkirakan kota tersebut akan mengalami “angin kencang hingga badai” pada hari Rabu. Cuaca akan buruk dengan hujan deras yang sering terjadi dan gelombang badai yang signifikan.

Kemudian mengeluarkan peringatan badai tropis level 1 pada pukul 12.20 siang dan mempertimbangkan untuk menaikkan levelnya menjadi peringatan level 3 pada malam hari seiring dengan mendekatnya Topan Ragasa ke kota dengan kecepatan relatif tinggi.

Dalam keterangannya, pada pukul 05.00 waktu Hong Kong, Ragasa diketahui sedang melintasi Selat Luzon dengan kecepatan angin di sekitar pusatnya mencapai 230 km/jam.

“Karena jangkauan yang luas dan kecepatan pergerakannya yang cepat, Ragasa akan menjadi ancaman yang cukup besar bagi pantai Guangdong,” kata pejabat ilmiah senior di lembaga peramal cuaca, Choy Chun-wing, dikutip dari SCMP, Senin (22/9/2025).

Topan Ragasa diperkirakan tidak akan memudar secara signifikan sebelum mendekati kota. Oleh karena itu, lanjut Choy, ancamannya dapat jauh lebih besar.

Selain itu, Choy juga memperingatkan badai tersebut berpotensi mempengaruhi gelombang dan menjadi pasang signifikan. Dia memperkirakan akan

serupa dengan yang terjadi pada Topan Hato pada 2017 dan Topan Mangkhut. Kedua topan tersebut memicu sinyal peringatan tertinggi nomor 10 di Hong Kong.

Dia juga mengatakan bahwa badai tropis diperkirakan akan berada paling dekat dengan Hong Kong pada Rabu (24/9/2025) pagi dan warga “tidak akan memiliki waktu yang lama” untuk melakukannya persiapan.

Tinggi air laut maksimum yang tercatat di stasiun pasang surut Quarry Bay milik Observatorium saat Topan Hato dan Mangkhut mendekati Hong Kong masing-masing mencapai 3,57 dan 3,88 meter, menjadikannya yang ketiga dan kedua tertinggi dalam catatan.

Daerah-daerah rendah, seperti Lei Yue Mun, Heng Fa Chuen, beberapa desa di Tuen Mun, dan Tai O, terendam banjir akibat topan-topan tersebut.

Observatorium juga memperingatkan bahwa angin lokal akan secara bertahap menguat pada Selasa (23/9/2025), dengan kondisi diperkirakan akan cepat memburuk segera setelahnya.

“Diharapkan angin berkecepatan badai hingga badai tropis akan mendominasi secara lokal pada Rabu, dan angin mungkin mencapai kecepatan badai tropis di lepas pantai

dan di daerah dataran tinggi,” kata Choy.

“Cuaca akan buruk dengan hujan lebat disertai angin kencang dan badai petir,” tambahnya.

Para pejabat mengatakan mereka berencana untuk menumpuk karung pasir dan memasang penghalang banjir untuk beberapa desa pesisir di kota tersebut. Biro Pendidikan mengumumkan pada hari Senin bahwa semua sekolah akan diliburkan pada hari Selasa dan Rabu.

Otoritas rumah sakit kota mengatakan rumah sakit umum telah menerapkan langkah-langkah khusus untuk memastikan layanan darurat tidak terpengaruh selama badai. Saat ini Ragasa sendiri tengah melintasi Selat Luzon antara Taiwan selatan dan Filipina utara.

Sementara itu, diperkirakan badai tersebut semakin menguat saat bergerak ke arah barat laut dan diperkirakan akan mendarat di kepulauan Batanes atau Babuyan yang berpenduduk jarang pada sore hari.

“Angin berkelanjutan maksimum adalah 205 kilometer per jam di pusat badai pada pukul 11 malam hari Minggu, dengan hembusan mencapai hingga 250 km/jam saat bergerak menuju negara kepulauan tersebut,” kata layanan

cuaca dikutip AFP.

Atas bencana ini, Pemerintah Filipina meliburkan kantor dan sekolah pada hari Senin (22/9/2025) di Metro Manila dan di 29 provinsi. Para pejabat daerah tidak boleh membandingkan keluarga dari zona bahaya.

Sedangkan di Taiwan, pihak berwenang mengatakan hampir 300 orang akan dievakuasi dari Kabupaten Hualien di bagian timur. Angka tersebut dapat berubah tergantung pada pergerakan topan.

“Kami memperkirakan bahwa peringatan topan darat akan dikeluarkan malam ini... dan besok pagi pukul 6 pagi topan akan mendekati lepas pantai Taiwan,” kata Badan Cuaca Pusat.

Dampak ke Indonesia

Pada Minggu (21/9/2025), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengeluarkan prediksi dampak dari adanya Siklon Tropis Ragasa.

“Siklon Tropis Ragasa terpantau di Laut Filipina timur Pulau Luzon dengan kecepatan angin maksimum sekitar 100 knot (185 km/jam) dan tekanan udara minimum 925 hPa. Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Ragasa meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 5 (lima) dengan pergerakan ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG di Instagram, Minggu (21/9/2025) malam.

Siklon tropis ini diperkirakan memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di wilayah Indonesia. Wilayah yang diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akibat Topan Ragasa adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Sementara, wilayah perairan Kepulauan Sangihe - Talaud diperkirakan akan mengalami gelombang laut tinggi antara 1,25 hingga 2,5 meter. (han,ist/lut)



Siklon Tropis Ragasa terpantau di Laut Filipina timur Pulau Luzon dengan kecepatan angin maksimum sekitar 100 knot (185 km/jam) dan tekanan udara minimum 925 hPa. Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Ragasa meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 5 (lima) dengan pergerakan ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia,”

tulis BMKG di Instagram, Minggu (21/9/2025)